PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. BENNY, M. Kes
Jabatan : DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI LUWU TIMUR	DIREKTUR RSUD I LAGALIGO
Drs. H. BUDIMAN, M.Pd	**dr. BENNY, M. Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	93
2.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA RSUD I LAGALIGO	NILAI SAKIP HASIL EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT	70.5

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.127,248,451,286,-	APBD+BLUD
2.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 21,913,207,805,-	APBD

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

dr. BENNY. M. Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT	• Mutu Pelayanan Rumah Sakit adalah derajat kesempurnaan pelayanan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di Rumah Sakit secara wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosio budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat konsumen. • Akreditasi Rumah Sakit merupakan salah satu cara untuk menilai mutu pelayanan Rumah Sakit. Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit merupakan hal yang sangat penting, karena Rumah Sakit memberikan pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam sistem pelayanan dan sasaran kegiatannya adalah jiwa manusia.
2.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA RSUD I LAGALIGO	• SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	• Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik yaitu Rumah Sakit dengan pengisian kuesioner. • Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan RS. • Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
2.	NILAI SAKIP HASIL EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT	• Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Internal Inspektorat Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme RS semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	93	Target Tahunan IKM diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS setiap tahunnya.
2.	70.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Internal Inspektorat menunjukkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RS Tahun 2022 diharapkan meningkat.

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

dr. BENNY. M. Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASO SIMUN, SKM
Jabatan : KABAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. BENNY. M.Kes
Jabatan : DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD I LAGALIGO	KABAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
dr. BENNY, M. Kes	**BASO SIMUN, SKM**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ESELON III : BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UPT RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	KUALITAS PERENCANAAN OPD	TINGKAT KESELARASAN PERENCANAAN OPD	100%
2.	KUALITAS MONITORING DAN EVALUASI	LAP MONEV TEPAT WAKTU	100%
		TINDAK LANJUT HASIL MONEV	100%
3.	TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN OPD	LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	100%
4.	KUALITAS PENGELOLAAN ASET OPD	PERSENTASE PENGELOLAAN ASET YANG SESUAI STANDAR	100%
5.	KUALITAS SDM OPD	PERSENTASE KINERJA ASN OPD DENGAN RATA-RATA KINERJA DIATAS 90%	100%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN OPD	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN OPD	100%

	PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	***PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA***	***Rp***	***89,950,706,523***	***APBD + BLUD***
-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	51,059,750	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	29,677,032,895	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	8,000,000	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	7,602,200,000	
-	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	52,612,413,878	
	JUMLAH	**Rp**	**89,950,706,523**	

DIREKTUR ,

dr. BENNY, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196808062001121003

KABAG ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN

BASO SIMUN, SKM
Pangkat : Pembina
NIP : 197204071994031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	KUALITAS PERENCANAAN OPD	• Perencanaan adalah suatu yang dilakukan atau disusun untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. • Dalam menyusun perencanaan di OPD harus memiliki kualitas yang baik agar rencana yang telah disusun dalam perencanaan tidak terjadi bias yang jauh dari tujuan yang akan di capai.
2.	KUALITAS MONITORING DAN EVALUASI	• Monitoring dan Evaluasi adalah merupakan bagian yang dilaksanakan untuk kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan. • Kualitas monitoring penting untuk mengetahui hal-hal yang kemungkinan dapat menjadi penyebabnya kurang optimal progress pelaksanaan program atau kegiatan OPD yang merupakan tujuan organisasi. Dengan adanya monev yang berkualitas hal-hal yang secara potensial dapat menghambat proses program atau kegiatan dapat diketahui secara dini.
3.	TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN OPD	• Pengelolaan keuangan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai amanat yang tertuang dalam pasal 3 (1) UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan rasa keadilan dan kepatuhan dapat semakin terwujud. Berdasarkan hal tersebut OPD dalam pengelolaan keuangan harus sesuai.
4.	KUALITAS PENGELOLAAN ASET OPD	• Pengelolaan aset adalah hal yang mutlak dilakukan oleh OPD dengan baik dengan cara yang efektif. Karena dengan memanfaatkan aset yang terkelola sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi atau OPD. • Pengelolaan aset atau barang milik Daerah adalah merupakan suatu rangkaian yang

		merupakan Tindakan konkret Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5.	KUALITAS SDM OPD	• Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik maupun mental akan berdampak pofitif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing namun juga sangat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan dengan capaian pelayanan yang lebih optimal.
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN OPD	• Peningkatan kualitas pelayanan adalah merupakan titik penting dalam pemenuhan harapan. OPD dalam pelayanannya harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	TINGKAT KESELARASAN PERENCANAAN OPD	• Sistem perencanaan pembangunan yang diterapkan di Indonesia diatur melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan beserta turunannya yang mengatur mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. • Tingkat keselarasan serta sinergitas dalam perencanaan dan penganggaran menjadi penting untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh OPD.
2.	LAP MONEV TEPAT WAKTU	• Laporan Monev tepat waktu adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya laporan monev yang dilaksanakan dengan tepat waktu yang dikelola dengan baik akan memberikan informasi berupa progress atas program dan kegiatan serta informasi dini bila terdapat kendala yang secara potensial dapat menghambat pencapaian tujuan.
	TINDAK LANJUT HASIL MONEV	• Tindak lanjut hasil monev adalah bentuk memastikan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk perbaikan OPD mencapai hasil atau capaian output yang lebih optimal.
3.	LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	• Laporan keuangan tepat waktu merupakan cerminan bahwa informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan merupakan informasi yang relevan, dikatakan relevan karena informasi tersebut terbaru dan tepat

		waktu, sehingga laporan keuangan memiliki manfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi bagi OPD.
4.	PERSENTASE PENGELOLAAN ASET YANG SESUAI STANDAR	• Pengelolaan aset yang sesuai standar Organisasi harus menentukan cara pengelolaan aset yang sesuai, termasuk cara perawatan dan pemeliharaan aset, serta cara mengukur dan mengevaluasi kinerja aset. Diharapkan OPD dapat meningkatkan pengelolaan aset yang sesuai standar.
5.	PERSENTASE KINERJA ASN OPD DENGAN RATA-RATA KINERJA DIATAS 90%	• Konsep batasan pengertian kinerja terdengar nyaring dikaitkan dengan keberadaan ASN yakni kinerja ASN yang diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.
6.	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN OPD	• Indeks Kepuasan Pelayanan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	100%	Tercapai Dokumen Perencanaan dengan kualitas yang baik
2.	100%	Tercapai Monitoring dan Evaluasi tepat waktu dan hasil Tindak lanjut hasil monev
3.	100%	Tercapai dengan baik administrasi keuangan dalam bentuk pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4.	100%	Tercapai dengan baik Pengelolaan Aset RS
5.	100%	Tercapai kualitas SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik
6.	100%	Tercapai peningkatan kualitas pelayanan RS

Pihak Kedua,
DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

dr. BENNY, M. Kes

Pihak Pertama,
KABAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

BASO SIMUN, SK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes
Jabatan : KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. BENNY, M.Kes
Jabatan : DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DIREKTUR RSUD I LAGALIGO	KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
dr. BENNY, M. Kes	**SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes**

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
RSUD I LAGALIGO

BIDANG : PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	24,5%
2.	Terlaksananya Pelayanan Pasien Rujukan di Rumah Sakit	Persentase pasien rujukan yang dilayani	98 %
3.	Tersedianya SDM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai kebutuhan	Persentase tingkat kecukupan SDM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	90 %
4.	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Persentase capaian SPM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	90 %
5.	Tersedianya Alkes Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Sesuai Kebutuhan	Persentase ketersediaan Alkes Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja ASN RS Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan Rata-rata kinerja di atas 90%	Persentase ASN Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan kinerja di atas 90%	100%
7.	Tersusunnya petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya	Jumlah dokumen uraian tugas dan fungsi Staf	1 Dokumen uraian tugas dan fungsi staf
8.	Tersusunnya dokumen laporan triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Jumlah dokumen laporan triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	4 Dokumen laporan triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
9.	Tersedianya Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Jumlah dokumen laporan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	1 Dokumen laporan capaian standar pelayanan minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp.1.169.329.060,-**	**APBD**
	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp.1.169.329.060,-	
2	**Penyediaan layanan Kesehatan untk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rp.4.149.386.745,-**	**APBD**
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp.4.149.386.745,-	APBD
3	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Rp. 314.886.000**	**BLUD**
	Belanja Linen	Rp. 314.886.000	

Wotu, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua,

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

dr. BENNY, M. Kes

Pihak Pertama,

KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
2.	Terlaksananya Pelayanan Pasien Rujukan di Rumah Sakit	Rumah Sakit sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan melayani Pasien Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
3.	Tersedianya SDM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai kebutuhan	SDM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah SDM yang bekerja di unit Pelayanan Medik dan Keperawatan
4.	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2021
5.	Tersedianya Alkes Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Sesuai Kebutuhan	Alkes Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah alkes yang mendukung pelayanan pada unit pelayanan medik dan Keperawatan sesuai standar.
6.	Meningkatnya Kinerja ASN RS Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan Rata-rata kinerja di atas 90%	Kinerja ASN merupakan hasil evaluasi kinerja ASN sesuai standar kerja yang telah ditetapkan
7.	Tersusunnya petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya	Kebijakan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang< Kepala Seksi dan Staf
8.	Tersusunnya dokumen laporan triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Dokumen Laporan Triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan merupakan Laporan capaian program/ kegiatan per triwulan
9.	Tersedianya Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan yang terdiri atas 7 Unit/ Layanan.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan jumlah Kunjungan terhadap jumlah Penduduk
2.	Persentase pasien rujukan yang dilayani	Persentase Pasien Rujukan yang dilayani sesuai dengan kapasitas dan kemampuan RS
3.	Persentase tingkat kecukupan SDM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Persentase ketersediaan SDM terhadap kebutuhan SDM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
4.	Persentase capaian SPM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Persentase Jumlah Indikator SPM yang tercapai sesuai target dibagi jumlah indikator SPM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
5.	Persentase ketersediaan Alkes Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Persentase Jumlah Alkes yang terpenuhi dibagi jumlah alkes sesuai strandar pelayanan yang tersedia di RS
6.	Persentase ASN Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan kinerja di atas 90%	Persentase Jumlah ASN dengan kinerja di atas 90% dibagi jumlah ASN Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
7.	Jumlah dokumen uraian tugas dan fungsi Staf	Tersedia Dokumen uraian Tugas dan fugssi staf
8.	Jumlah dokumen laporan triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Tersedia laporan capaian program/kegiatan per triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
9.	Jumlah dokumen laporan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Tersedia dokumen laporan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	24,5%	Persentase Jumlah Kunjungan Pasien di RS dibagi Jumlah Penduduk
2.	98%	Persentase Jumlah pasien yang dilayani di rs dibagi jumlah kunjungan pasien
3.	90 %	Persentase jumlah ketersediaan SDM dibagi jumlah kebutuhan SDM
4.	90%	Persentase jumlah indikator SPM tercapai sesuai target dibagi jumlah indikator SPM
5.	90 %	Persentase Jumlah Alkes yang terpenuhi dibagi jumlah alkes sesuai strandar pelayanan yang tersedia di RS
6.	100 %	Persentase Jumlah ASN dengan kinerja di atas 90% dibagi jumlah ASN Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
7.	1 Dokumen uraian tugas dan fungsi staf	Tersedia Dokumen uraian Tugas dan fungsi staf
8.	4 Dokumen laporan triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Tersedia laporan capaian program/kegiatan per triwulan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
9.	1 Dokumen laporan capaian standar pelayanan minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Tersedia dokumen laporan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

DIREKTUR RSUD I LAGALIGO

dr. BENNY, M. Kes

KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hajar Nur, S.Si.,Apt, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. Benny, M.Kes
Jabatan : Direktur
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu,16 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Direktur	Kabid Penelitian dan Pengembangan SDM
dr. Benny, M.Kes	**Hajar Nur, S.Si.,Apt, M.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RS	PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN RS	57%
2.	KUALITAS KELEMBAGAAN RS	TINGKAT AKREDITASI	PARIPURNA
3	PEMANFAATAN IT/ SIM-RS	PERSENTASE MODUL YANG TERINTEGRASI DALAM SIM-RS	100%

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	KET
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA	Rp	**626.224.016**	**BLUD**
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	626.224.016	
JUMLAH	**Rp**	**626.224.016**	

Direktur

dr. Benny, M.Kes

Kabid Penelitian dan Pengembangan SDM

Hajar Nur, S.Si.,Apt, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RS	Pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2.	KUALITAS KELEMBAGAAN RS	Pengakuan Terhadap Mutu Pelayanan rumah Sakit
3.	PEMANFAATAN IT/ SIM-RS	Keberadaaan SIMRS berperan untuk meningkatkan mutu pelayanan medis rumah sakit

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN RS	Porsentase Rata rata peningkatan Kompetensi manajerial dan komptensi Teknis Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
2.	TINGKAT AKREDITASI	Tingkat Akreditasi yang diperoleh Rumah Sakit Setelah Melalui Survey akreditasi oleh Lembaga Akreditasi
3	PERSENTASE MODUL YANG TERINTEGRASI DALAM SIM-RS	Persentase modul SIM RS yang terintegrasi

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	57%	Persentase target untuk Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
2.	PARIPURNA	predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di rumah sakit
3.	100%	Seluruh modul terintegrasi

Direktur

dr. Benny, M.Kes

Kabid Penelitian dan Pengembangan SDM

Hajar Nur, S.Si.,Apt, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Putu Gede Sudarsana,SKM, M.Kes**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. BENNY, M.Kes**
Jabatan : Direktur RSUD I Lagaligo
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Direktur RSUD I Lagaligo	Kabid Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
dr. BENNY, M.Kes	**Putu Gede Sudarsana,SKM, M.Kes**
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc	Pangkat : Pembina/IVa
NIP : 19680608 200112 1 003	NIP : 19820205 200604 1 0

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	MUTU SARANA DAN PRASARANA RS	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA RS SESUAI STANDAR	80%
2.	ALKES YANG TERSTANDAR DAN BERIZIN	PERSENTASE PEMENUHAN ALAT KESEHATAN DIRUMAH SAKIT	80%
3.	KETERSEDIAN OBAT DAN BMHP	TINGKAT PEMENUHAN OBAT DAN BMHP	100%
4.	KUALITAS KELEMBAGAAN RS	PERSENTASE PENCAPAIAN SPM BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK	90%
5.	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	TINGKAT KECUKUPAN SDM PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK	100%

Program	Anggaran	Keterangan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rp. 16.771.817.000**	**APBD**
- Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.771.817.000	APBD
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**Rp. 36.332.290.102**	**BLUD**
- Peningkatan pelayanan BLUD	Rp. 36.332.290.102	BLUD
JUMLAH	**Rp. 53.104.107.102**	

Direktur RSUD I Lagaligo

dr. BENNY, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19680608 200112 1 003

Kabid Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Putu Gede Sudarsana,SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina/IVa
NIP : 19820205 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	MUTU SARANA DAN PRASARANA RS	Sarana Prasarana Rumah Sakit memiliki kehandalan dalam menunjang operasional pelayanan.
2.	ALKES YANG TERSTANDAR DAN BERIZIN	Operasional pelayanan kesehatan rumah sakit ditunjang oleh peralatan yang standar, aman, dan berijin.
3.	KETERSEDIAN OBAT DAN BMHP	Ketersedian Obat, BMHP sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan.
4.	KUALITAS KELEMBAGAAN RS	Kelembagaan Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan di ruang lingkup pelayanan serta menciptakan sistem pelayanan yang cepat , tepat dan terstandar.
5.	KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rumah sakit ditunjang oleh ketersedian sumber daya manusia yang representatif dan profesional.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA RS SESUAI STANDAR	Pelayanan rumah sakit ditunjang oleh sarana prasarana rumah sakit berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku.
2.	PERSENTASE PEMENUHAN ALAT KESEHATAN DIRUMAH SAKIT	Alat kesehatan yang digunakan d rumah sakit di penuhi oleh ketentuan standar yang berlaku.
3.	TINGKAT PEMENUHAN OBAT DAN BMHP	Pemenuhan Obat dan BMHP ketersediannya sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
4.	PERSENTASE PENCAPAIAN SPM BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK	Pencapaian SPM lingkup Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sesuai dengan targer SPM.
5.	TINGKAT KECUKUPAN SDM PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK	Ketersedian SDM di pelayanan penunjang Medik dan Non Medik sesuai dengan pelayanan.

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	80%	Masih terdapat beberapa sarana prasarana rumah sakit yang belum mencapai target.
2.	80%	Penggunaan alat-alat kesehatan yang multiparameter sehingga mampu meminimalisir ketersedian peralatan bila di bandingkan dengan standar satu (1) alat untuk setiap ruangan.
3.	100%	Kebutuhan Obat dan MBHP di rumah sudah mencapai target.
4.	90%	Masih terdapat unit yang target SPM yang belum tercapai.
5.	100%	Kebutuhan SDM di rumah sakit sudah mencapai target.

Direktur RSUD I Lagaligo

dr. BENNY, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19680608 200112 1 003

Kabid Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Putu Gede Sudarsana,SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina/IVa
NIP : 19820205 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kulsum, S.ST, M.Kes
Jabatan : Kasubbag Perencanaan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Baso Simun, SKM
Jabatan : Kabag Administrasi Umum dan Keuangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KABAG ADM.UMUM & KEUANGAN	KASUBAG PERENCANAAN
BASO SIMUN, SKM	**UMI KULSUM, S.ST, M.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ESESLON IV : SUBBAG PERENCANAAN
UPT. RSUD I LAGALIGO KAB.LUWU TIMUR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	3 dokumen
2.	Tersusunnya dokumen anggaran sesuai standar	Jumlah dokumen anggaran OPD yang disusun	6 dokumen
3.	Tersedianya data laporan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan bagian/ bidang	16 dokumen
4.	Terlaksananya koordinasi data dan laporan OPD	Jumlah koordinasi yang dilaksankan	4 kali
5.	Tersusunnya laporan kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan kinerja OPD yang disusun	1 dokumen
6.	Terlaksananya monev berkala	Jumlah monev OPD yang dilaksankan	6 kali

	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Rp. 51.059.750,-	APBD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Rp. 38.826.250,-	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Okhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 12.233.500,-	

KABAG. ADM. UMUM DAN KEUANGAN

BASO SIMUN, SKM

KASUBAG PERENCANAAN

UMI KULSUM, S.ST, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai standar	Dokumen perencanaan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan pencapaian kinerja rumah sakit, sehingga dokumen yang disusun harus sesuai standar
2.	Tersusunnya dokumen anggaran sesuai standar	Dokumen anggaran serbagai acuan pelaksanaan belanja disusun harus sesuai standar, ini untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan belanja yang berdampak pada kesalahan penerapan peraturan perundangan – undangan dan akuntabilitas, efektif dan efesiensi dapat dilaksankan.
3.	Tersedianya data laporan tepat waktu	Laporan yang dibuat dan diselesaikan tepat waktu akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan OPD, dimana dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD bukan hanya ber asumsi tapi didasari oleh data .
4.	Terlaksananya Koordinasi data dan laporan	OPD dalam melaksankan tugas dan fungsinya merupak bagian dari PEMDA, penyampaian data dan laporan ketingkat kabupaten merupakan bentuk koordinasi atas kinerja pembangunan daerah
5.	Tersusunnya laporan kinerja OPD	Rumah sakit sebagai OPD dalam melaksankan tupoksi diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tupoksinya baik secara kinerja maupun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi dan pertanggung jawaban atas kinerja yang diperjanjikan.
6.	Terlaksananya monev berkala	Untuk mengontrol, evaluasi dan melakukan perbaikan atas kegiatan yang dilaksankan sangat dibutuhkan adanya monev. Dengan monev segala kendala yang dihadapi akan dicarikan solusi dan keberhasilan yang diperoleh dapat dijadikan contoh oleh bagian lain.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Untuk mengukur tercapainya sasaran tersusunnya dokumen perencanaan OPD dibuktikan dengan dihasilkannya Dokumen perencanaan.
2.	Jumlah dokumen anggaran OPD yang disusun	Untuk mengukur tercapainnya sasaran a tersusunnya dokumen anggaran OPD ini dapat dilihat dari berapa jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan belanja kegiatan.
3.	Jumlah Dokumen Laporan Bagian dan Bidang	Jumlah Keluaran dari kegiatan yang dilaksankan bidang/ bagian adalah dokumen laporan bidang yang dibuat tepat waktu
4.	Jumlaha koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi adalah banyaknya kegiatan koordinasi yang dilaksanakan sebagai bentuk monev kab terhadap kegiatan yang dilaksankan OPD
5.	Jumlah dokumen laporan OPD yang disusun	Untuk mengukur sasaran tersusunnya dokumen kinerja OPD dilihat dengan OPD memiliki dokumen laporan kinerja
6.	Jumlah monev kinerja OPD yang dilaksankan	Untuk mengukur terlaksananaya monev yang dilaksankan adalah dengan berapa kali monev yang dilaksankan

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	3 Dokumen	Dokumen perencanaan bersumber APBD disusun setahun 2 kali yaitu di pokok dan di perubahan, selain itu sebelum penyusunan anggaran disusun RKPD awal/akhir sehingga target dokumen perencanaan ditargetkan 3 dokumen .
2.	6 Dokumen	Dokumen anggaran yang di susun setiap tahun adalalah DPA, RBA, RKA baik pokok maupun perubahan sehingga ditargetkan 6 dokumen anggaran.
3.	16 Dokumen	Laporan bidang/ bagian dibuat setiap triwulan sehingga dalan 1 triwulan akan dimiliki dokumen laporan bidang sebanyak 4 dokumen, kalua dalam setahun berarti akan memiliki 16 dokumen.
4.	4 Kali	Rapat koordinasi kabupaten dilaksanakan setiap triwulan sehingga dalam 1 tahun aka nada minimal 4 kali krapat koordinasi
5.	1 Dokumen	Laporan kinerja OPD disusun setelah tahun keg berakhir setahun sekali, dan penyusunan lapaoran kinerja (lakip) tahun sebelumnya dilaksankan pada triwulan pertama tahun berjalan.

6.	6 Kali	Monev OPD yang dilaksankan minimal setiap triwulan, dan direncanakan ada 2 kali monev untuk capaian SPM rumah sakit sehingga ditargetkan 6 kali monev

KABAG ADM. UMUM DAN KEUANGAN

BASO SIMU, SKM

KASUBAG PERENCANAAN

UMI KULSUM, S.ST, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yance Toyang,SKM.M.Tr.Adm.Kes
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keungan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Baso Simun, SKM
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua, Kabag Administrasi Umum dan Keuangan	Pihak Pertama, Kasubag Keuangan
Baso Simun,SKM	**Yance Toyang,SKM.M.Tr.Adm.Kes**
NIP.197204071994031007	NIP.197912182006041015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai rumah sakit	Jumlah Pegawai	14 Bulan
2.	Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD di Rumah Sakit yang Optimal	Jumlah Kunjungan Pasien BLUD (Kunjungan) Jumlah PAD BLUD (Rp)	97.277 kunjungan Rp.83.000.000.000
3	Pembayaran honor/ insentif Dewas dan Sekertaris Dewas	Terbayarnya honor/ insentif Dewas dan Sekertaris Dewas	12 Bulan
4	Pembayaran jasa Pelayanan pegawai	Terbayarnya Jasa Pelayanan Peawai	12 Bulan
5	Pembayaran jasa tenaga ahli	Terbayarnya jasa tenaga ahli	12 bulan
6	Pembayaran jasa koran/ majalah	Terbayarnya biaya langganan koran/majalah	12 Bulan
7	Pembayaran langganan air Rumah Sakit	Terbayarnya langganan air Rumah Sakit	12 bulan
8	Pembayaran langganan Listrik Rumah Sakit	Terbayarnya langganan Listrik Rumah Sakit	12 bulan
9	Pembayaran langganan telepon Rumah Sakit	Terbayarnya langganan telepon Rumah Sakit	12 Bulan
10	Pembayaran langganan internet Rumah Sakit	Terbayarnya langganan internet Rumah Sakit	12 Bulan
11	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Rumah Sakit	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai Rumah Sakit Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Daerah Pegawai Rumah Sakit	35 kali 21 kali

Program	Anggaran	Keterangan	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp29.668.162.895,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Kabupaten Kota.	Rp47.149.320.924,-	BLUD

Kabag Administrasi Umum dan Keuangan

Baso Simun,SKM
NIP.197204071994031007

Kasubag Keuangan

Yance Toyang,SKM.M.Tr.Adm.Kes
NIP.197912182006041015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai rumah sakit	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai,TPP dan kelangkaan profesi dokter spesialis

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD di Rumah Sakit yang Optimal	Kunjungan pasien pada RSUD I Lagaligo terdiri dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap yang akan berkotribusi terhadap pendatapan BLUD RSUD I Lagaligo
2	Pembayaran honor/ insentif Dewas dan Sekertaris Dewas	Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewas BLUD yang dibayarkan Setiap bulan berdasarkan SK Bupati No.268/G-01/VIII/Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas RSUD I Lagaligo masa Bakti 2022-2027 dan SK Bupatu 395/G-01/XII/Tahun 2022 Tentang pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas Pada RSUD I Lagaligo Masa Bakti 2022-2027
3	Pembayaran jasa Pelayanan pegawai	Jasa Pelayanan pasien JKN yang telah diklaim dan dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan pasien umum yang telah diterima pembayarannya di kasir selanjutnya dibuatkan rincian penerimaan untuk dibayarkan ke masing-masing pegawai.
4	Pembayaran jasa tenaga ahli	Untuk mempertahankan mutu layanan dan ketersediaan layananan tenaga dokter spesialis pada RSUD I Lagaligo.
5	Pembayaran jasa koran/ majalah	Langganan jasa koran atau media sebagai mitra Rumah sakit dalam menyampaikan informasi dan mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan atau mempromosikan layanan Rumah Sakit.
6	Pembayaran langganan air Rumah Sakit	Sarana air bersih merupakan kebutuhan yang sangat fital yang dibutukan setiap saat, baik petugas maupun pasien.
7	Pembayaran langganan Listrik Rumah Sakit	Tenaga listik adalah sarana yang wajib tersedia dilingkungan rumah sakit, selain sebagai sarana penerangan juga sebagai sarana penungjang dalam mengoperasionalkan kerja alat-alat Kesehatan.
8	Pembayaran langganan telepon Rumah Sakit	Langganan telephone adalah sarana komunikasi yang disediakan di Rumah sakit sebagai sarana penunjang dalam berkomunikasi baik untuk sesama petugas Kesehatan maupun kepada pasien dan keluarga.

9	Pembayaran langganan internet Rumah Sakit	Jaringan internet merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam mengakses Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit untuk kemudahan dalam memberikan Pelayanan kepada pasien, sehingga Ketepatan waktu dan respon time dapat tercpai dari standar yang ditentukan.
10	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Rumah Sakit	Perjalanan dinas bagi pegawai yang melakukan tugas diluar lingkungan rumah sakit baik itu di dalam daerah kabupaten Luwu Timur maupun diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kabag Administrasi Umum dan Keuangan

Baso Simun,SKM
NIP.197204071994031007

Kasubag Keuangan

Yance Toyang,SKM.M.Tr.Adm.Kes
NIP.197912182006041015

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MUSLIMIN, SKM, M.Tr. Adm. Kes
Jabatan	:	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	BASO SIMUN, SKM
Jabatan	:	KEPALA BAGIAN ADMKINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
BASO SIMUN, SKM	**MUSLIMIN, SKM, M.Tr.Adm.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2023
RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	TERSUSUNNYA DOKUMEN ASSET OPD	JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN ASSET OPD	1	Dokumen
2.	TERLAKSANANYA KOORDINASI TENTANG ASET DAN PERSEDIAAN OPD	JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI TENTANG ASET DAN PERSEDIAAN OPD	12	Kali
3.	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PENUNJANG KANTOR	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PENUNJANG KANTOR	4	Laporan
4.	TERLAKSANANNYA PENATAAN ARSIP DINAMIS OPD	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN PENATAAN ARSIP DINAMIS OPD	4	Laporan
5.	TERLAKSANANNYA JASA UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN JASA UMUM KANTOR	4	Laporan
6.	TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	4	Laporan
7.	TERLAKSANANNYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH DOKUMEN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	6	Dokumen

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 7.602.200.000	APBD
2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 8.000.000	APBD

Wotu,
Pihak Pertama,

Muslimin, SKM, MTr.Adm.Kes

Pihak Kedua,

Baso Simun, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	TERSUSUNNYA DOKUMEN ASSET OPD	• Pengelolaan aset adalah hal yang mutlak dilakukan oleh OPD dengan baik dengan cara yang efektif. Karena dengan memanfaatkan aset yang terkelola sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi atau OPD. • Pengelolaan aset atau barang milik Daerah adalah merupakan suatu rangkaian yang merupakan Tindakan konkret Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2.	TERLAKSANANYA KOORDINASI TENTANG ASET DAN PERSEDIAAN OPD	• Pengelolaan aset adalah hal yang mutlak dilakukan oleh OPD dengan baik dengan cara yang efektif. Karena dengan memanfaatkan aset yang terkelola sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi atau OPD. • Pengelolaan aset atau barang milik Daerah adalah merupakan suatu rangkaian yang merupakan Tindakan konkret Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3.	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PENUNJANG KANTOR	• Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
4.	TERLAKSANANNYA PENATAAN ARSIP DINAMIS OPD	• Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu • Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
5.	TERLAKSANANNYA JASA UMUM KANTOR	• Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan jasa/honorarium bagi pelayanan umum kantor dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya Anggaran untuk operasional kegiatan seperti penyediaan jasa kebersihan kantor.
6.	TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	• Pelayanan Administrasi Kepegawaian merupakan Sistem administrasi kepegawaian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan berupa Kegiatan rekrutmen PNS , Sistem penggajian PNS, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau penilaian kinerja, Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberhentian dan Pensiun

7.	TERLAKSANANNYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	• Kegiatan Administrasi Kepegawaian merupakan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau penilaian kinerja seluruh pegawai pada sub bagian umum dan kepegawaian RSUD I Lagaligo

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN ASSET OPD	• Pelaporan Pengelolaan aset yang sesuai standar Organisasi harus menentukan cara pengelolaan aset yang sesuai serta cara mengukur dan mengevaluasi kinerja aset. Dan Diharapkan laporan aset yang dapat dijadikan pengambilan kebijaka untuk program organisasi yang lebih baik .
2.	JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI TENTANG ASET DAN PERSEDIAAN OPD	• Kegiatan Koordinasi Pengelolaan aset dan Persedian Rumah Sakit yang dilakukan rutin setiap triwulan diharapakan dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan aset dan persediaan.
3.	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PENUNJANG KANTOR	• Laporan kegiatan pemeliharaan rutin secara berkala dan tepat waktu merupakan cerminan bahwa informasi yang tersedia di dalam laporan tersebut dapat menjadi informasi untuk progran dan kegiatan selanjutnya.
4.	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN PENATAAN ARSIP DINAMIS OPD	• Laporan Pengelolaan arsip dinamis disusun untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
5.	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN JASA UMUM KANTOR	• Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan jasa/honorarium bagi pelayanan umum kantor dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya Anggaran untuk operasional kegiatan seperti penyediaan jasa kebersihan kantor.
6.	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	• Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian merupakan laporan kegiatan berupa Kegiatan rekrutmen PNS , Sistem penggajian PNS, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau penilaian kinerja, Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberhentian dan Pensiun
7.	JUMLAH DOKUMEN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	• Laporan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau penilaian kinerja seluruh pegawai pada sub bagian umum dan kepegawaian RSUD I Lagaligo

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	1 Dokumen	Tersusunnya Jumlah Dokumen Pelaporan Asset OPD
2.	12 Kegiatan	Tersusunnya jumlah kegiatan koordinasi tentang aset dan persediaan OPD
3.	4 Laporan	Tersusunnya jumlah laporan kegiatan pemeliharaan rutin berkala penunjang kantor
4.	4 Laporan	Tersusunnya jumlah laporan kegiatan penataan arsip dinamis opd

5.	4 Laporan	Tersusunnya jumlah laporan kegiatan jasa umum kantor
6.	4 Laporan	Tersusunnya jumlah laporan kegiatan administrasi kepegawaian
7.	6 Dokumen	Tersusunnya jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai

Wotu, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Kabag. Administrasi Umum dan Keuangan

BASO SIMUN, SKM

Pihak Pertama,

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

MUSLIMIN, SKM, M.Tr.Adm.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUNARTI, SKM, M.Tr.Adm,Kes
Jabatan : KASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes
Jabatan : KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KABID PELAYANAN MEDIK	KASI PELAYANAN
DAN KEPERWATAN	KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes	**PUNARTI,SKM, M.Tr. Adm.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

ESELON IV : SEKSI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN TAHUN ANGGARAN 2023

RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kredensialing Tenaga Kesehatan	Jumlah RKK Perawat dan Bidan	398 Dokumen
2	Pengurusan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Perawat dan Bidan yang memiliki izin praktek	398 Orang
3	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan tenaga perawat dan bidan	90 %
4	Penyusunan SOP Pelayanan	Jumlah SOP dan SAK Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan yang di susun	5 Dokumen
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	Jumlah Monev Standar Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	4 Kali
6	Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja Perawat dan Bidan	100 %

Wotu, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

SUHELMI, S.Si, Apt., M.Kes

Pihak Pertama,

KASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

PUNARTI, SKM,M.Tr.Adm,Kes

No	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**2.238.166.745**	**APBD**
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Linen)	Rp	236.188.745	
	- Belanja Lembur (Lembur PNS dan Non PNS)	Rp	2.001.978.000	
2	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Rp**	**315.966.000**	**BLUD**
	- Belanja Linen	Rp	315.966.000	
	JUMLAH	**Rp**	**2.317.944.000**	

Wotu, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan Medik
Dan Keperawatan

SUHELMI,S.Si, Apt,M.Kes

Pihak Pertama,
Kasi Pelayanan Keperawatan
Dan Kebidanan

PUNARTI,SKM,M.Tr,Adm.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	Kredensialing Tenaga Kesehatan (Perawat dan Bidan)	Kredensialing Tenaga Kesehatan (Perawat dan Bidan) adalah proses evaluasi terhadap tenaga Keperawatan dan Kebidanan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, tujuannya untuk menjamin akuntabilitas perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan asuhan Keperawatan dan Kebidanan bagi pasien
2.	Pengurusan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat dan Bidan untuk melakukan praktik keperawatan dan Kebidanan di sarana pelayanan kesehatan.
3.	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan (Perawat dan Bidan) sesuai kebutuhan	Pemenuhan Tenaga (Perawat dan Bidan di unit layanan
4.	Penyusunan SOP Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya dan SOP disusun untuk menunjang pelayanan
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar	Proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dalam bentuk rapat evaluasi
6.	Penilaian Kinerja Pegawai	Melakukan penilaian kinerja pegawai lingkup seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah RKK Perawat dan Bidan	Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan memiliki rincian kewenangan klinis
2.	Jumlah Perawat dan Bidan yang memiliki izin praktek	Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan memiliki surat Izin praktik keperawatan dan Kebidanan di sarana pelayanan kesehatan.
3.	Persentase pemenuhan tenaga perawat dan bidan	Tenaga (Perawat dan Bidan) di unit layanan terpenuhi minimal 90 % dari kebutuhan
4.	Jumlah SOP dan SAK Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan yang di susun	Jumlah SOP Pelayanan yang di susun
5.	Jumlah Monev Standar Pelayanan	Rapat Evaluasi Standar Pelayanan
6.	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja Perawat dan Bidan	Dokumen penilaian kinerja perawat dan bidan

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	398 Dokumen	Pemberi Pelayanan (Perawat dan Bidan) dikredensialing untuk diterbitkan Rincian Kewenangan Klinisnya
2.	398 Orang	Perawat dan Bidan yang memiliki Izin praktek disarana pelayanan kesehatan RSUD I Lagaligo
3.	90 %	Pemenuhan Tenaga Perawat dan Bidan terpenuhi minimal 90 %
4.	5 Dokumen	SOP Pelayanan kesehatan yang disusun
5.	4 Kali	Rapat Monitoring dan evaluasi dilaksnakan per triwulan
6.	100 %	Seluruh pegawai (Perawat dan Bidan) dilakukan evaluasi kinerja

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Suhelmi, S.Si Apt M.Kes

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Punarti,SKM Mtr.Adm.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NS. ABDUL ASIS, S.Kep**
Jabatan : KASI PELAYANAN MEDIK

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUHELMI, S.Si, Apt, M.Kes**
Jabatan : KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KABID PELAYANAN MEDIK	KASI PELAYANAN MEDIK
DAN KEPERWATAN	
SUHELMI, S.Si., Apt., M.Kes	**NS. ABDUL ASIS, S.Kep**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kredensialing Tenaga Kesehatan	Jumlah RKK Medis	56 Dokumen
2.	Pengurusan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Medis yang Memiliki Izin Praktek	56 Orang
3.	Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan	90 %
4.	Penyusunan SOP Pelayanan	Jumlah SOP Pelayanan Medis yang disusun	5 Dokumen
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Standar	Jumlah Monev Standar Pelayanan Medis	4 Kali
6.	Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja Medis	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	***Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Rp1.780.800.000***	***APBD***
-	Jasa MoU Dokter Spesialis	Rp 795.000.000	
-	Belanja Tim Supervisi/Visitasi	Rp 148.000.000	
-	Dokter Internship, Kepala Ruangan dan MoU Fisika Medik	Rp 247.200.000	
-	Sewa Rumah Dinas Dokter	Rp 60.000.000	
-	Jasa Pelayanan Visum	Rp 5.000.000	
-	Pengantaran Pulang Pasien	Rp 525.600.000	
	JUMLAH	**Rp 1.780.800.000**	

Kabid Pelayanan Medik
dan Keperawatan

Suhelmi, S.Si, Apt, M.Kes
Nip. 19800313 200502 2 005

Kasi Pelayanan Medik

Ns. Abdul Asis, S.Kep
Nip. 19790208 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	Kredensialing Tenaga Kesehatan	Kredensialing dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan tenaga Kesehatan yang kompeten dan dapat menjalankan kewenangan klinis yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, perlindungan kepada SDM serta meningkatkan kepuasan pasien.
2.	Pengurusan Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Izin Praktik Profesi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada dokter, sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik di bidang masing-masing.
3.	Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan	Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, dan berdayaguna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4.	Penyusunan SOP Pelayanan	Dengan adanya SOP akan mempermudah Pegawai melaksanakan pekerjaan, memudahkan mendeteksi hambatan-hambatan yang mungkin akan dialami dan penerapan SOP mendorong Pegawai untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Standar	Monitoring melihat pada apa yang sedang dilakukan, sementara evaluasi memeriksa apa yang sudah dicapai atau apa dampak yang sudah berhasil dibuat.
6.	Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pegawai mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah RKK Medis	1. Jumlah RKK tenaga Dokter spesialis 33 Orang 2. Jumlah RKK tenaga Dokter Umum 23 Orang
2.	Jumlah Medis yang Memiliki Izin Praktek	1. Jumlah RKK tenaga Dokter spesialis 33 Orang 2. Jumlah RKK tenaga Dokter Umum 23 Orang
3.	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan	Dokter Spesialis 100 % dan Dokter Umum 100 %
4.	Jumlah SOP Pelayanan Medis yang disusun	SOP pelayanan sesuai probis sebanyak 5
5.	Jumlah Monev Standar Pelayanan Medis	Monev Standar pelayanan Medis 1 Kali
6.	Persentase Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja Medis	Penilaian kinerja medis sebanyak 100 %

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	56 Dokumen	Jumlah RKK medis sebanyak 56 Dokumen terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum
2.	56 Orang	Jumlah tenaga medis yang memiliki izin prakter terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum
3.	90 %	Persentase pemenuhan tenaga medis kesehatan terdiri dari dokter spesialis 100 % dan dokter umum 100 %
4.	5 Dokumen	Jumlah SOP pelayanan medis yang disusun berdasarkan probis sebanyak 5 dokumen
5.	4 Kali	Jumlah Monev standar pelayanan medis sebanyak 1 kali
6.	100 %	Persentase penyusunan dokumen penilaian kinerja medis sebanyak 100 %

Kabid Pelayanan Medik
dan Keperawatan

Suhelmi, S.Si, Apt, M.Kes
Nip. 19800313 200502 2 005

Kasi Pelayanan Medik

Ns. Abdul Asis, S.Kep
Nip. 19790208 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ESELON IV : SEKSI PELAYANAN MEDIK TAHUN ANGGARAN 2023
UPT RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	KREDENSIALING TENKES	JUMLAH RKK MEDIS	56 DOKUMEN
2.	PENGURUSAN IZIN PRAKTEK TENKES	JUMLAH MEDIS YANG MEMILIKI IZIN PRAKTEK	56 ORANG
3.	PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA MEDIS	90%
4.	PENYUSUNAN SOP PELAYANAN	JUMLAH SOP PELAYANAN MEDIS YANG DISUSUN	5 DOKUMEN
5.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	JUMLAH MONEV STANDAR PELAYANAN MEDIS	4 KALI
6.	PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA MEDIS	100%

	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1.	***Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		***Rp1.780.800.000***	***APBD***
	- Jasa MoU Dokter Spesialis	Rp	795.000.000	
	- Belanja Tim Supervisi/Visitasi	Rp	148.000.000	
	- Dokter Internship, Kepala Ruangan dan MoU Fisika Medik	Rp	247.200.000	
	- Sewa Rumah Dinas Dokter	Rp	60.000.000	
	- Jasa Pelayanan Visum	Rp	5.000.000	
	- Pengantaran Pulang Pasien	Rp	525.600.000	
	JUMLAH	**Rp**	**1.780.800.000**	

KABID PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

SUHELMI, S.SI,Apt,M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19800313 200502 2 005

KASI PELAYANAN MEDIK

NS. ABDUL ASIS, S.Kep
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19790208 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV : KASI PELAYANAN MEDIK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN (TARGET)			
				TRIWULAN		KINERJA	KEUANGAN
1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya dokter spesialis sesuai kebutuhan	Jumlah MoU Kemitraan Rumah Sakit	TW I	:	5	198.750.000
				TW II	:	5	198.750.000
				TW III	:	5	198.750.000
				TW IV	:	5	198.750.000
		Terlaksananya Belanja Tim Supervisi / Visitasi	Jumlah Belanja Tim Supervisi / Visitasi	TW I	:	**5**	37.000.000
				TW II	:	**5**	37.000.000
				TW III	:	**5**	37.000.000
				TW IV	:	**5**	37.000.000
		Terlaksananya Internship , Kepala Ruangan dan MoU Fisika Medik	Jumlah Dokter Internship, Kepala Ruangan dan Fisika Medik	TW I	:	36	61.800.000
				TW II	:	36	61.800.000
				TW III	:	36	61.800.000
				TW IV	:	36	61.800.000
		Terlaksananya Sewa Rumah Dinas Dokter	Jumlah Sewa Rumah Dinas Dokter	TW I	:	2	15.000.000
				TW II	:	2	15.000.000
				TW III	:	2	15.000.000
				TW IV	:	2	15.000.000
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi pasien Non BPJS dan Non Umum di Rumah Sakit (Pengantaran Pasien Pulang)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi pasien Non BPJS dan Non Umum di Rumah Sakit (Pengantaran Pasien Pulang)	TW I	:	250	131.400.000
				TW II	:	250	131.400.000
				TW III	:	250	131.400.000
				TW IV	:	250	131.400.000

Wotu, 02 Oktober 2023

Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan

Suhelmi, S.Si, Apt,M.Kes
NIP.19800313 200502 2 005

Kasi Pelayanan Medik

Ns. Abdul Asis, S.Kep
NIP. 19790208 200902 1 001

LAPORAN EVALUASI KINERJA ESELON IV
RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR

KASI : **PELAYANAN MEDIK**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET 2023			REALISASI			%	KET
			FISIK			FISIK			FISIK	
1	TERSUSUNNYA DOKUMEN KREDENSIALING TENKES	JUMLAH RKK MEDIS	TW. I	:	61	TW. I	:	61	100%	
			TW.II	:	0	TW.II	:	-		
			TW.III	:	56	TW.III	:	56	100%	
			TW.IV	:	61	TW.IV	:	61	100%	
			JLH	**:**	**178**	**JLH**	**:**	**178**	**100%**	
2	TERSUSUNNYA PENGURUSAN IZIN PRAKTEK TENKES	JUMLAH MEDIS YANG MEMILIKI IZIN PRAKTEK	TW. I	:	61	TW. I	:	61	100%	
			TW.II	:	0	TW.II	:	-	-	
			TW.III	:	56	TW.III	:	56	100 %	
			TW.IV	:	61	TW.IV	:	61	100%	
			JLH	**:**	**178**	**JLH**	**:**	**178**	**100%**	
3	TERSEDIANYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA MEDIS	TW. I	:	0	TW. I	:	0	0%	
			TW.II	:	0%	TW.II	:	-	-	
			TW.III	:	60%	TW.III	:	60%	100%	
			TW.IV	:	30%	TW.IV	:	30%	100%	
			JLH	**:**	**90 %**	**JLH**	**:**	**90%**	**100%**	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	TARGET 2023	REALISASI	%	KET
			FISIK	FISIK	FISIK	
4	TERSUSUNNYA DOKUMEN PENYUSUNAN SOP PELAYANAN	JUMLAH SOP PELAYANAN MEDIS YANG DISUSUN	TW. I : 0	TW. I : -	100%	
			TW.II : 0	TW.II : -	-	
			TW.III : 3	TW.III : 3	100 %	
			TW.IV : 2	TW.IV : 2	100%	
			JLH : 5	**JLH : 5**	**100%**	
5	TERLAKSANANYA MONEV PELAKSANAAN STANDAR	JUMLAH MONEV STANDAR PELAYANAN MEDIS	TW. I : 1	TW. I : 1	100%	
			TW.II : 1	TW.II : 1	100%	
			TW.III : 1	TW.III : 1	100%	
			TW.IV : 1	TW.IV : 0	0%	
			JLH : 4	**JLH : 3**	**75%**	
6	TERSUSUNNYA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA MEDIS	TW. I : 0%	TW. I : 0	0%	
			TW.II : 0%	TW.II : 0	0%	
			TW.III : 50%	TW.III : 50%	100%	
			TW.IV : 50%	TW.IV : 50%	100%	
			JLH : 100%	**JLH : 100%**	**100%**	

Wotu, 02 Oktober 2023

Mengetahui,
Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan

Suhelmi, S.si, Apt,M.Kes
NIP : 19800313 200502 2 005

Dibuat Oleh,
Kasi Pelayanan Medik

Ns. Abdul Asis, S.Kep
NIP. 19790208 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. SYIHAB JUNAID, S.Farm
Jabatan : KASI PENGEMBANGAN SDM
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes
Jabatan : KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KABID PENELITIAN DAN	KASI PENGEMBANGAN SDM
PENGEMBANGAN SDM	
HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes	**MOH. SYIHAB JUNAID, S.Farm**
Pangkat : Pembina	Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip. 19790301 200502 2 007	Nip. 19830322 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Persentase SDM yang Mengikuti Pelatihan	497
2.	Perizinan Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki Izin Praktek	644
3.	Pemenuhan ABK Kebutuhan Tenaga	Persentase Pemenuhan Tenaga Sesuai ABK	270
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Pengembangan SDM	Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Penyusunan Pengembangan SDM	4 Dokumen
5.	Pemeriksaan Medical Check Up (MCU) Tenaga Rumah Sakit	Jumlah Tenaga yang melakukan pemeriksaan Kesehatan Medical Check Up (MCU)	73
6.	Perizinan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RS)	Persentase Perizinan Sarana dan Prasarna yang Terpenuhi	4

Program	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Pelayanan BLUD		
1. Belanja Pengembangan SDM	Rp 381.953.178,-	BLUD
2. Belanja Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	Rp 9.409.400,-	BLUD
3. Belanja Perizinan dan Sertifikasi	Rp 4.750.000,-	BLUD

KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes
Pangkat : Pembina
Nip. 19790301 200502 2 007

KASI PENGEMBANGAN SDM

MOH. SYIHAB JUNAID, S.Farm
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip. 19830322 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengembangan SDM mencakup pelatihan Exhause Training dan Inhouse Training, berupa workshop, bimtek, Lokakarya, Seminar, Diklat, Sosialisasi
2.	Perizinan Tenaga Kesehatan	Perizina untuk tenaga yang bekerja berupa Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah memiliki kompetensi dan Surat Isin Praktek (SIP)
3.	Pemenuhan ABK Kebutuhan Tenaga	Pemenuhan Kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan Analisa Jabatan (ANJAB)
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Pengembangan SDM	Kegiatan Pemantauan secara berkal untuk mempertahankan penerapan standar pengembangan SDM baik secara administrasi dan implementasi
5.	Pemeriksaan Medical Check Up (MCU) Tenaga Rumah Sakit	Upaya memantau atau mengetahui kondisi kesehatan tenaga rumah sakit secara berkala
6.	Perizinan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (RS)	Perizinan untuk memberikan legalisasi operasional Sarana dan Prasarana

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase SDM yang Mengikuti Pelatihan	Exhouse Training : 62 Inhouse Training : 434
2.	Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki Izin Praktek	Dokter : 51 Bidan & perawat : 429 Nakes Lainnya : 164
3.	Persentase Pemenuhan Tenaga Sesuai ABK	Target ABK : 270 Terpenuhi : 232
4.	Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Penyusunan Pengembangan SDM	Laporan Kegiatan pemantauan implementasi pengembangan SDM
5.	Jumlah Tenaga yang melakukan pemeriksaan Kesehatan Medical Check Up (MCU)	Target Tenaga yang mengikuti Pemeriksaan Medical CheckUp (MCU) sekitar 525 terdiri dari PNS dan Tenaga kontrak, yang terlaksanan hanya 73 orang dari total jumlah tenaga dari 829, hal ini disebabkan karena Alokasi Anggaran pembelian Alat Medis Habis Pakai

		(AMHP) tidak tersedia atau mengalami relokasi anggaran ke kegiatan/subkegiatan belanja yang lain
6.	Persentase Perizinan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	Legalisasi pengurusan operasional masa berlakunya perizinan Sarana dan Prasarana rumah sakit (untuk Uji Pemeriksaan Lift M3 lantai 2 terlaksana dilakukan namun hasil dari pemeriksaan dari balai K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi selatan tidak layak untuk dioperasionalkan)

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	497	Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran
2.	644	Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam melakukan aktivitas memberikan pelayanan kesehatan
3.	270	Pemenuhan kebetuhan sesuai perhitungan ABK dan ANJAB
4.	4 Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi Per-Triwulan
5.	525/73	Pemeriksaan Medical Check Up (MCU) sesuai Standar
6.	4	Sesuai dengan masa berlakunya operasional perizinan sarana dan prasarana rumah sakit - Uji Pemeriksaan Elevator Kamar Operasi/Laboratorium & M1, M3 Lantai 2 - Uji Pemeriksaan Mesin Genzet

KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes
Pangkat : Pembina
Nip. 19790301 200502 2 007

KASI PENGEMBANGAN SDM

MOH. SYIHAB JUNAID, S.Farm
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
Nip. 19830322 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANIS SIAHAYA, S.Kep, M. Tr. Adm. Kes

Jabatan : KASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes

Jabatan : KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, Januari 2023

Pihak Kedua, KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Pihak Pertama KASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN
HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes	**YOHANIS SIAHAYA, M.Tr.Adm.Kes**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ESELON IV : KASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN
RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	PEMELIHARAAN SIM-RS	JUMLAH APLIKASI DAN SARANA SIM-RS YANG DIPELIHARA	24 APLIKASI, HARDWARE & JARINGAN
2.	PENGEMBANGAN SIM-RS	PERSENTASE MODUL SIM-RS YANG DIKEMBANGKAN	4 MODUL
3.	PELAKSANAAN AKREDITASI RS	PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT	80%
4.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	JUMLAH DOKUMEN MONEV PELAKSANAAN STANDAR	4 DOKUMEN
5.	PROMOSI RS	JUMLAH LAYANAN/KEGIATAN YANG TERPUBLIKASI/DI CETAK	40 POSTINGAN & 20 ITEM CETAKAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET
1. Peningkatan Pelayanan BLUD			**BLUD**
• Belanja Pemeliharaan IT	Rp.	280.000.000,-	
• Belanja Jasa Promosi	Rp.	115.000.000,-	
• Belanja Pengembangan SIMRS	Rp.	-	
• Akreditasi RS	Rp.	-	
JUMLAH	**Rp.**	**395.000.000,-**	

BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19790301 200502 2 007

SEKSI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM

YOHANIS SIAHAYA, M.Tr.Adm.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19801216 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	PEMELIHARAAN SIM-RS	Pemeliharaan SIMRS mencakup Software/Aplikasi, Hardware dan Jaringan yang ada dalam lingkup RSUD I Lagaligo agar senantiasa dapat berfungsi normal
2.	PENGEMBANGAN SIM-RS	Pengembangan dari modul yang telah ada maupun pembuatan modul/aplikasi baru atau bridging dengan aplikasi lain
3.	PELAKSANAAN AKREDITASI RS	Mempertahankan standar kelulusan dari setiap Pokja Akreditasi
4.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	Kegiatan pemantauan secara berkala untuk mempertahankan penerapan standar akreditasi baik secara administrasi dan implementasi
5.	PROMOSI RS	Upaya penyebarluasan informasi terkait layanan RS

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	JUMLAH APLIKASI DAN SARANA SIM-RS YANG DIPELIHARA	Aplikasi : 23 modul layanan, 1 Portal E-Klaim, 1 Website RS, SIDOKAR dan Antrian Online. Jaringan : 1500 meter LAN, 44 Swich LAN, 3 Provider Internet dan 3 Router Hardware : 3 Server, 139 PC, 76 Printer, 97 Stavolt dan 23 UPS
2.	PERSENTASE MODUL SIM-RS YANG DIKEMBANGKAN	Jumlah modul/aplikasi yang di kembangkan atau baru dibuat termasuk di bridgingkan dengan aplikasi lainnya
3.	PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT	Target skor minimal kelulusan setiap POKJA Akreditasi (Min 80%)
4.	JUMLAH DOKUMEN MONEV PELAKSANAAN STANDAR	Laporan kegiatan pemantauan implementasi standar dari setiap Pokja Akreditasi
5.	JUMLAH LAYANAN/KEGIATAN YANG TERPUBLIKASI/DI CETAK	Banyaknya publikasi terkait layanan RS baik di media cetak, media social dan Website

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	24 APLIKASI, HARDWARE & JARINGAN	Pemeliharaan full 1x24 jam

2.	4 MODUL	Sesuai urgensi kebutuhan yang menjadi prioritas pengembangan
3.	80%	Standar minimal Kelulusan dari setiap POKJA
4.	4 DOKUMEN	Laporan Monev Per-Triwulan
5.	40 POSTINGAN & 20 ITEM CETAKAN	Sesuai dengan jumlah Publikasi Layanaan RS pada Media Cetak, Media Sosial dan Website

BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

HAJAR NUR, S.Si, Apt, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19790301 200502 2 007

SEKSI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM

YOHANIS SIAHAYA, M.Tr.Adm.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19801216 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yeremia Pratama, SKM**
Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medik
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Putu Gede Sudarsana,SKM,M.Kes**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik
Putu Gede Sudarsana,SKM,M.Kes	**Yeremia Pratama,SKM**
NIP.19820205 200604 1 011	NIP.19811217 200502 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA PENUNJANG MEDIK	85%
2.	KREDENSIALING TENKES	JUMLAH RKK TENAGA PENUNJANG MEDIK	31 Orang
3.	PEMENUHAN DOKUMEN REKAM MEDIK	PERSENTASE DOKUMEN RM YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	100%
4.	PENYEDIAAN DATA PELAYANAN RS	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA PELAYANAN RS	100%
5.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	JUMLAH MONEV STANDAR PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	4 KALI

	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**ANGGARAN**
1.	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	**Rp. 769.537.016-**
	-Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 610.084.000,-
	- Belanja Cetak rekam medik	Rp. 101.000.500,-
	-Belanja Bahan Peralatan Dapur dan Pentry	Rp. 31.598.875,-
	-Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp. 95.097.150,-
	- Belanja Bahan Instalasi dan Bahan Material	Rp. 269.813.741,-
	-Belanja Bahan Peralatan Kerja	Rp. 15.378.750,-
	-Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 42.634.000 ,-
	-Belanja Pengisian Tabung Gas	Rp. 141.414.000,-
	-Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp. 72.600.000,-
	JUMLAH	**Rp. 769.537.016,-**

BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM M.Kes
NIP. 19820205 200604 1 001

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Yeremia Pratama,SKM
NIP. 19750616 199803 2006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1.	PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN	Kebutuhan Tenaga Penunjangn Medik Berdasarkan pada peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar Pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan
2.	KREDENSIALING TENKES	Kredensial tenaga kesehatan merupakan sebuah **kebijakan dalam hal peningkatan mutu. Kredensial meliputi** review, verifikasi,dan evaluasi kompetensi dengan metode portofolio kelengkapan dokumen seperti ijazah, STR, SIK, logbook dan sertifikat pelatihan serta surat keterangan sehat, wawancara, praktek dan uji tulis komite.
3	PEMENUHAN DOKUMEN REKAM MEDIK	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis ELektronik, menjadi dasar RSUD I Lagligo untuk menerapkan dan menggunakan APlikasi SIM RS dalam Pemenuhan Dokumen Rekam Medis.
4	PENYEDIAAN DATA PELAYANAN RS	Data Pelayanan yang dikumpulkan akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menevaluasi pelayanan serta kebutuhan dalam merencanakan pelayanan di masa yang akan datang
5	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR	Monitoring dan Evaluasi dilakukan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA PENUNJANG MEDIK	Presentase Pemenuhan tenaga penunjang medik dihitung dari Jumlah yang ada di masing-masing Ruangan InstalasiPenunjang Medik dibagi Jumlah Keseluruhan Tenaga yang ada.
2.	JUMLAH RKK TENAGA PENUNJANG MEDIK	RIncian Kewenangan Klinis adalah Dokumen yang dipersiapkan sebagai syarat sebelum tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan di Instalasi Penunjang Medik
3	PERSENTASE DOKUMEN RM YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	Dokumen Rekam Medis yang disiapkan dan diselesaikan untuk pemenuhan laporan

4	PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA PELAYANAN RS	Jumlah Laporan yang disedikan atau harus dilaporkan oleh Seksi Penujnag Medik
5	JUMLAH MONEV STANDAR PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	Jumlah Kegiatan MONEV dilaksanakan setiap Triwulan oleh Seksi Penunjang Medik

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	85%	Kekurangan Tenaga terdapat pada Instalasi Rekam Medis yakni Tenaga Admisi
2.	31 Orang	Pada Triwulan IV Sudah Terpenuhi dengan rincian: 1. Rekam Meid 6 oRang 2. Laboratorium 12 Orang 3. Radiologi 5 orang 4. Unit Transfusi Darah 3 Orang 5. Fisoterapi 5 orang Total 31 orang
3.	100%	Laporan dari Ruangan dan Instalasi pada Triwulan 4 prsentase 50 %
4.	100%	Laporan dari Ruangan dan Instalasi pada Triwulan 4 prsentase 50 %
5.	4 KALI	Pelaksanaan Monev baru dilaksanan 2 kali

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Putu Gede Sudarsana,SKM,M.Kes
NIP. 19820205 200604 1 011

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Yeremia Pratama,SKM
NIP. 19750816 199803 2006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mashar, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	Pihak Pertama, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
Putu Gede Sudarsana, SKM,M.Kes Pangkat: Pembina NIP : 19820205 200604 1 011	Mashar, S.Si, Apt Pangkat : Pembina NIP : 19740301 200902 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan alat kesehatan/alat kedokteran	Jumlah alat kesehatan/alat kedokteran RS yang diadakan	103 unit
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	5 jenis
3	Pengadaan obeat dan BMHP sesuai formularium RS	Jumlah jenis obat dan BMHP yang diadakan	Obat 170 jenis BMHP 128 jenis
4	Monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan BMHP	Jumlah monev obat dan BMHP yang dilaksanakan	4 kali
5	Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat yang dipelihara dan dikalibrasi	503 unit
6	Monitoring dan evaluasi	Jumlah monev penunjang non medik yang dilaksanakan	4 kali

Sub Kegiatan	**Anggaran**	**Keterangan**
I. Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 16.771.817.000,-**	
• Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp. **16.771.817.000,-**	
✓ Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp. 1.629.317.000,-	
✓ Belanja Obat - Obatan	Rp. 6.520.647.100,-	
✓ Belanja BMHP	Rp. 7.246.852.900,-	
✓ Belanja Gas Medis	Rp. 480.000.000,-	
✓ Belanja Bahan Kimia	Rp. 895.000.000,-	
II. Peningkatan Pelayanan BLUD	**Rp. 35.562.753.087,-**	
1. Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	**Rp. 31.126.004.634,-**	
• Belanja obat-obatan	Rp. 13.410.449.247,-	
• Belanja BMHP	Rp. 10.842.200.531,-	
• Belanja Gas Medis	Rp. 1.992.074.052,-	
• Belanja Bahan Kimia	Rp. 2.479.070.542,-	
• Belanja Bahan Makanan Pasien	Rp. 2.402.210.262,-	
2. Belanja Barang Pelayanan	**Rp. 13.500.000,-**	
• Belanja Pemulasaran Jenazah	Rp. 13.500.000,-	

- ♦ Belanja jasa pemeriksaan (air, udara dan gas) Rp. 30.279.000,-

4. Pemeliharaan Peralatan, Mesin dan Bangunan **Rp. 3.283.290.544,-**
   - pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah sakit Rp. 378.174.866,-
   - pemeliharaan alat kesehatan Rp. 831.540.749,-
   - pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 348.069.249,-
   - pemeliharaan pengelolaan limbah Rp. 1.465.505.680,-
   - pemeliharaan instalasi/jaringan Rp. 260.000.000,-
5. Belanja Peralatan dan mesin **Rp. 1.078.603.909,-**
   - Peralatan kesehatan/kedokteran rumah sakit Rp. 393.315.977,-
   - Peralatan dan perlengkapan rumah sakit Rp. 685.287.932,-
   - Pembangunan dan Pengembangan Sarana Fisik Lainnya **Rp.31.075.000,-**

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan
Penunjang Medik dan Non Medik	Penunjang Non Medik
Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes.	**Mashar, S.Si., Apt.**
Nip. 19820205 200604 1 011	Nip. 19740301 200902 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN	PENJELASAN
1	Pemenuhan alat kesehatan/alat kedokteran	Kondisi alat kesehatan dari waktu ke waktu mengalami penurunan fungsi apalagi adanya penambahan bangunan dan ruangan membutuhkan pemenuhan alat kesehatan untuk menjamin layanan RS yang lebih optimal.
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Kegiatan ini terkait dengan pemeliharaan di rumah sakit sehingga kondisi baik peralatan dan perlengkapan RS, alat kesehatan, bangunan dan gedung, pengelolaan limbah serta pemeliharaan instalasi/jaringan selalu dalam kondisi baik dan layak pakai.
3	Pengadaan obat dan BMHP sesuai formularium RS	Sasaran kegiatan ini adalah penyediaan bahan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan obat-obatan dan bahan material habis pakai (BMHP). Penyediaan obat tersebut harus sesuai dengan formularium RS.
4	Monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan BMHP	Penyediaan obat dan BMHP terkadang mengalami kekosongan baik di pelayanan maupun di gudang IFRS. Kondisi ini harus diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi agar tidak mengganggu layanan di RS.
5	Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan	Kegiatan ini terkait dengan pemeliharaan di rumah sakit sehingga kondisi alat kesehatan selalu dalam kondisi baik dan layak pakai. Khusus kalibrasi alat kesehatan rutin dilakukan setiap tahun untuk memastikan hasil dari setiap alat kesehatan memenuhi standar yang disyaratkan
6	Monitoring dan evaluasi	Seluruh rangkaian kegiatan di pelayanan penunjang non medik harus terus ditingkatkan melalui monitoring dan evaluasi.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah alat kesehatan/alat kedokteran RS yang diadakan	Penyediaan atau pengadaan alat kesehatan yang telah direncanakan sebelumnya harus sesuai volume dan jumlah yang telah ditentukan. Penentuan jumlah alat kesehatan yang diadakan dikondisikan sesuai alat kesehatan yang tidak fungsional dan juga memenuhi adanya penambahan ruangan baru.
2.	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang menjadi bagian tanggung jawab layanan penunjang non medik meliputi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan RS, alat kesehatan, bangunan dan gedung, limbah serta pemeliharaan instalasi/jaringan.
3	Jumlah jenis obat dan BMHP yang diadakan	Jenis obat dan BMHP yang begitu banyak agak sulit untuk dilakukan semua penyediaan dan pengadaannya karena keterbatasan anggaran. Perlu dilakukan skala prioritas dalam memilah jumlah jenis obat dan BMHP yang akan diadakan.
4	Jumlah monev obat dan BMHP yang dilaksanakan	Penting untuk menentukan berapa kali monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan. Disamping untuk efisensi waktu juga untuk memastikan bahwa kegiatan monev tersebut tepat dan layak.
5	Jumlah alat yang dipelihara dan dikalibrasi	Alat kesehatan yang tersedia dan digunakan di RS begitu banyak sehingga membutuhkan kuantitas alat kesehatan yang akan dipelihara. Tidak semua alat kesehatan dilakukan kalibrasi sehingga jenis dan jumlahnya harus tepat.
6	Jumlah monev penunjang non medik yang dilaksanakan	Instalasi dan unit dibawah pelayanan penunjang non medik begitu banyak dan kompleks sehingga monev harus dilakukan seefisien mungkin.

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	103 unit	Terdapat 103 unit jumlah alat kesehatan yang akan diadakan dan disesuaikan dengan usulan perencanaan yang telah dikondisikan dengan pelayanan yang akan diberikan.
2.	5 jenis	Terdapat 5 jenis pemeliharaan sarana prasarana RS yang menjadi bagian tanggung jawab pelayanan penunjang non medik. Kelima jenis tersebut adalah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan RS, pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan bangunan, pemeliharaan limbah serta instalasi/jaringan
3	Obat 170 jenis BMHP 128 jenis	Pengadaan dan penyediaan obat di RS kurang lebih 170 jenis dan fluktuasi bisa meningkat lebih dari itu. Terdapat 128 jenis BMHP yang akan direncanakan diadakan dan bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan.

4	4 kali	Frekuensi monitoring dan evaluasi obat dan BMHP dilaksanakan setiap 3 bulan untuk memastikan ketersediaan obat dan BMHP di rumah sakit.
5	503 unit	Terdapat 503 unit alat kesehatan yang akan dikalibrasi dan akan meningkat seiring dengan adanya penambahan alat kesehatan baru.
6	4 kali	Setiap 3 bulan sekali dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di instalasi atau unit dibawah koordinasi pelayanan penunjang non medik.

Wotu, Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pelayanan
Penunjang Medik dan Non Medik

Putu Gede Sudarsana, SKM, M.Kes.
Nip. 19820205 200604 1 011

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayanan
Penunjang Non Medik

Mashar, S.Si., Apt.
Nip. 19740301 200902 1 004